

BAB V

KESIMPULAN

Kondisi dan perilaku politik dalam sebuah negara dapat menentukan arah politik ekonominya untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sistem pemerintahan yang masih labil tidak akan membantu kestabilan ekonomi negerinya, baik yang didukung oleh faktor perilaku masyarakat maupun faktor eksternal yang berasal dari kebijakan negara lain dalam menghadapi pemerintahan yang berlangsung.

Demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan yang dianggap paling baik untuk mensejahterakan masyarakatnya banyak diterapkan di berbagai negara. Di bawah sistem ini, masyarakat dapat hidup dengan bebas di bawah pemerintahan yang dipilih oleh mereka sendiri. Tingginya perlindungan HAM juga menyebabkan banyak warga di dunia lebih menyukai konsep sistem demokrasi daripada sistem pemerintahan lainnya hingga muncul sebuah konsep bahwa demokrasi dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan HAM, kesejahteraan masyarakat juga dinilai dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara dan beberapa pakar mengaitkan bahwa demokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pendapat pakar ini sayangnya tidak dapat diimplementasikan kepada seluruh negara yang telah menerapkan demokrasi di negaranya. Terlebih pada masa krisis transisi antara sistem sebelumnya dan sistem baru yang diterapkan. Hal ini memunculkan pendapat bahwa adanya teori demokrasi yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi itu tidak sepenuhnya benar.

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat saja tetap berkembang walaupun tidak menggunakan sistem demokrasi sebagai contoh pada kasus di China. Pendapat ini kemudian dapat dilihat pada apa yang terjadi di Nepal saat ini. Keputusan Nepal menerapkan demokrasi penuh terhadap sistem pemerintahan dan konstitusinya justru membawa Nepal

pada kondisi ekonomi yang tidak seimbang dalam hal ekspor dan impor serta kurangnya persiapan masyarakat dalam menghadapi sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Pemerintah yang berkuasa serta pendidikan masyarakat adalah faktor penentu utama pada pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara penganut demokrasi. Pemerintah yang terpilih melalui jalur demokrasi tidak memberikan garansi akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Diperlukan pemimpin dengan perencanaan negara yang baik dan dukungan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Strategi perilaku ekonomi di dalam maupun luar negeri juga menjadi faktor penentu yang mempengaruhi laju ekonomi dalam sebuah negara. Terciptanya hubungan bilateral antar negara mengharuskan adanya kepercayaan antara negara-negara bersangkutan dengan kebijakan yang saling menguntungkan baik yang diterapkan antar negara maupun kebijakan dalam negeri yang berpengaruh secara tidak langsung pada negara bilateral tersebut.

Nepal yang sangat bergantung pada kerja sama perdagangan bilateral dengan negara lain mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun 2015 hingga 2016, naiknya angka impor luar negeri yang diikuti dengan penurunan angka ekspor produk Nepal menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan Nepal. Rendahnya angka ekspor ini disebabkan oleh tidak adanya bahan mentah yang diimpor dari India sehingga produksi di Nepal tersendat dan banyak pengusaha yang menutup perusahaannya atas kerugian yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang diterapkan oleh Nepal yang diharapkan dapat membantu perekonomian Nepal naik dari tahun-tahun sebelumnya justru membawa negaranya semakin sengsara dan kehilangan sumber *trading* utamanya karena pergantian sistem dan konstitusi tidak diikuti dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki perencanaan yang baik bagi Nepal kedepannya sekaligus tetap mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara lainnya.